**EVALUASI PEMBELAJARAN LITERASI INFORMASI DI MADRASAH**

**Budi Manfaat¹, Didin Nurul Rosidin², Hastuti Sari Budiningsih³**

¹IAIN Syekh Nurjati Cirebon, [budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id](mailto:budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id)

2IAIN Syekh Nurjati Cirebon, [didinnurulrosidin@gmail.com](mailto:didinnurulrosidin@gmail.com)

3Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article Info | | Abstract |
| *Submit:* -  *Accepted:* -  *Publish:* -  *Keyword:*  *consist of 3 to 6 keywords separated by semicolon (;). For example, Keyword one; keyword two; keyword three; keyword four; keyword five (Font Times New Roman, 8, single spacing, italic).*  *Kata Kunci:*  *Evaluasi pembelajaran; literasi informasi; madrasah* |  | *Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran literasi informasi di madrasah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Penelitian dilakukan di 14 Madrasah Aliyah yang ada di Jawa Barat. Hasil identifikasi menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki konsepsi literasi informasi sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara terbatas dipahami sebagai keterampilan komputer pengolah kata dan keterampilan mencari informasi Internet. Hanya sedikit guru yang memiliki konsepsi literasi informasi sebagai penerapan informasi untuk menghasilkan pengetahuan baru, pengembangan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran melalui penggunaan informasi. Demikian juga konsepsi literasi informasi sebagai pengalaman penelitian, seperti mengumpulkan pengalaman data primer, mengembangkan keterampilan menulis penelitian, dan menawarkan siswa untuk belajar melalui pengalaman. Studi ini juga menemukan adanya kesenjangan antara konsepsi dan praktik penerapannya. Banyak guru melihat perangkat teknologi informasi sebagai alat yang efektif untuk mengelola pembelajaran literasi informasi, tetapi tidak selalu berarti menggunakannya. Beberapa penyebabnya adalah terkait dengan dukungan perangkat, akses, pengetahuan, keterapilan, dan komitmen.* |
| **Abstrak** |
| *Abstract in Indonesia* |

**INTRODUCTION (Times New Roman font 12, Bold)**

Tantangan abad 21 bagi madrasah di Indonesia adalah membekali siswa yang terlahir sebagai *digital natives* dengan keterampilan abad 21 (Kurniawan, 2019). Tantangan itu terpenuhi jika guru madrasah memiliki kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, ataupun dalam pendidikan. Kemampun-kemampuan yang demikian disebut sebagai kemampuan literasi informasi.

Literasi informasi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan sumber daya informasi berkembang pesat. Pada era informasi, individu dihadapkan pada beragam pilihan informasi yang berlimpah. Informasi yang datang kepada individu dalam format tanpa filter, menimbulkan pertanyaan tentang keaslian, validitas, dan keandalannya. Selain itu, informasi yang tersedia melalui berbagai media itu menimbulkan tantangan baru bagi individu dalam mengevaluasi dan memahaminya. Kualitas yang tidak pasti dan kuantitas informasi yang berkembang menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Kelimpahan informasi tidak akan dengan sendirinya menciptakan masyarakat yang cerdas, tanpa kemampuan pelengkap yang diperlukan untuk menggunakan informasi secara efektif.

Generasi *digital natives* (Prensky, 2001) sangat mudah mendapatkan akses informasi menggunakan perangkat teknologi internet. Namun demikian, mereka bukan hanya memerlukan informasi. Mereka juga membutuhkan bimbingan dalam hal mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses pemecahan masalah. Mereka juga perlu mengembangkan sikap dan kepribadian yang baik melalui melalui keteladanan-keteladanan nyata.

Tanpa etika, kemampuan mengevaluasi konten informasi, dan menganalisis latar belakang informasi yang tersedia di internet, maka dapat berakibat munculnya pemahaman dan perilaku menyimpang. Temuan survei Katadata Insight Center (KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta SiBerkreasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoaks. Sebagian besar hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan dan agama.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Secara umum, pendidikan yang dimaksud adalah mencakup pendidikan keluarga, pendidikan sekolah atau madrasah, pendidikan pesantren, dan juga model pendidikan lainnya.

Studi tentang literasi informasi dalam konteks Pendidikan sekolah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya Moore (2000) dan Williams & Wavell (2006). Studi tersebut menemukan adanya keterkaitan antara pemahaman guru tentang literasi informasi dan keahlian keterampilan mereka, dengan bagaimana mereka menyampaikan literasi informasi di kelas. Moore (2000) melaporkan kompetensi literasi informasi yang terbatas di antara para guru dalam studinya. Meskipun sebagian besar guru dalam studinya di sekolah Selandia Baru percaya bahwa mereka memiliki pemahaman praktis tentang literasi informasi, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hampir separuh dari mereka tidak terbiasa dengan proses detail menemukan dan menggunakan informasi. Hal ini menunjukkan kurangnya kompetensi mereka untuk mengajarkan literasi informasi.

Peneliti lainnya yang telah mencoba memahami hubungan antara pemahaman guru tentang literasi informasi dan bagaimana mereka melaksanakan instruksi kelas adalah oleh Smith (2013). Smith menegaskan bahwa lingkungan dan pengalaman pribadi guru bertanggung jawab dalam membentuk instruksi mereka. Selain itu, ia menjelaskan bahwa guru membawa banyak pengalaman, pengetahuan profesional yang unik, dan asumsi mereka sendiri ke dalam kelas. Temuannya juga menunjukkan adanya kebingungan guru seputar istilah literasi informasi. Studi lainnya oleh Bawi (2002) dan Hart (2000) menunjukkan bahwa guru mata pelajaran hanya fokus pada materi pelajaran tugas siswa mereka, dan tidak membahas elemen literasi informasi. Jackson (2006), Julien dan Barker (2009), juga Williams dan Wavell (2006) mengungkapkan bahwa guru tidak mengajarkan informasi karena mereka sendiri belum tentu terlatih dalam keterampilan.

Dalam konteks kehidupan sosial yang multikultural seperti di Indonesia, kekacauan dapat mudah terjadi jika masyarakatnya tidak memiliki kompetensi literasi informasi. Madrasah sebagai salah satu model Pendidikan Islam perlu dievaluasi keberhasilannya dalam menerapkan pembelajaran literasi informasi.

**METHOD (Times New Roman font 12, Bold)**

.Studi evaluatif ini dilakukan di 14 Madrasah Aliyah di Jawa Barat. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*). Model evaluasi CIPP dipilih karena aspek yang ditinjau dalam model penelitian ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Terdapat empat aspek evaluasi dalam model CIPP, yaitu evaluasi *context* yang meliputi latar belakang pembelajaran literasi informasi, evaluasi *input* yang meliputi sumber daya yang mendukung terlaksananya pembelajaran literasi informasi, evaluasi *process* yaitu evalusi pelaksanaan pembelajaran literasi informasi, dan evaluasi product yaitu evaluasi hasil dari pelaksanaan pembelajaran literasi informasi.

Adapun variabel data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang diperlukan untuk menggali data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Sub Data** | **Sumber Data** | **Teknik Pengumpulan Data** | **Instrumen** |
| Konteks pembelajaran literasi informasi | Peluang dan kebutuhan madrasah dalam menghadapi era informasi | Kepala madrasah | Bertanya | Kuesioner |
| Input pembelajaran literasi informasi | Kesiapan guru dalam pembelajaran literasi informasi | Guru madrasah | Pegukuran | Skala kesiapan |
| Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran literasi informasi | Kepala madrasah/  Guru madrasah | Bertanya | Kuesioner |
| Proses pembelajaran literasi informasi | Perencanaan pembelajaran | Guru madrasah | Analisis dokumen | Dokumen renca pembelajaran (*lesson plan*) |
| Pelaksanaan pembelajaran | Guru madrasah | Bertanya | Kisi-kisi angket/kuisoner |
| Produk pembelajaran literasi informasi | Kemampuan literasi informasi siswa | Siswa madrasah | Pengukuran | *Situational Judgment Test* (SJT) |

**RESULT AND DISCUSSION (Times New Roman font 12, Bold)**

1. **Hasil**
2. **Gambaran Umum Tentang Madrasah di Jawa Barat**

Madrasah sebagai sebuah institusi Pendidikan Islam di Indonesia (waktu itu masih Nederland Indies) baru muncul pada awal abad ke 20. Kemunculan madrasah ini tidak lepas dari berbagai perubahan yang terjadi saat itu berikut tantangan yang mengiringinya. Paling tidak ada 2 tantangan yang dihadapi masyarakat Islam saat itu. Pertama adalah lahirnya kebijakan politik etis yang salah satunya mendorong perbaikan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi. Kebijakan ini diwujudkan dengan pendirian sekolah-sekolah rakyat sampai ke tingkat desa. Sekolah rakyat ini merupakan upaya revisi atas kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan kesempatan Pendidikan bagi pribumi kalangan atas dan keberadaannya juga terbatas. Namun bagi para aktivis Pendidikan Islam, pendirian sekolah rakyat secara massif ini dikhawatirkan akan menjadi media yang efektif untuk upaya sekularisasi dan westernisasi anak-anak muda Muslim. Tantangan kedua adalah menurunnya minat anak-anak muda Muslim untuk menempuh pendidikan di Lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang ada seperti musholla, langgar dan pesantren. Wajah tradisionalitas atau lebih tepatnya “kekolotan” dari Lembaga-lembaga Pendidikan Islam tersebut menjadi salah satu alasan utamanya. Melihat hal tersebut bisa dikatakan bahwa madrasah merupakan anak perubahan sekaligus jawaban atas tantangan yang dilahirkannya (Sahputra, 2018).

Nampaknya “ijtihad” para ulama awal abad ke 20 tersebut bisa dikatakan berhasil, jika pada dakade pertama dan kedua abad ke 20 hanya beberapa madrasah saja yang muncul seperti madrasah adabiyah di Sumatra dan Mathla’ul Anwar di Banten, pada decade berikutnya madrasah berkembang secara pesat. Misalnya Madrasah Mathla’ul Anwar yang berdiri pada tahun 1916 di Menes, Banten telah memiliki cabang lebih dari 40 cabang yang tersebar di berbagai wilayah mulai Banten, Bogor bahkan Karawang pada pertengahan tahun 1930-an (Rosidin, 2007). Singkatnya, madrasah telah berkembang pesat menjelang kemerdekaan Indonesia.

Melihat fakta tersebut di atas, tidaklah mengherankan jika pada saat perumusan peraturan awal tentang sistem pendidikan bagi Indonesia merdeka, madrasah menjadi salah satu locus utama perhatian dalam konteks pendidikan Islam sebagaimana tertuang dalam UU no. 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Hawi, 2017). Hal ini menarik mengingat bahwa secara historis, madrasah bukanlah lembaga pendidikan Islam awal yang berdiri dan berkembang di wilayah Indonesia atau Nederland Indies seperti halnya pesantren, meunasah, langar ataupun surau. Hal ini menunjukkan signifikannya pengaruh sekaligus pesatnya perkembangan madrasah di Indonesia sejak awal kemunculannya pada awal abad ke 20.

Perkembangan MA yang tersebar di Indonesia termasuk di Jawa Barat tentu tak luput dari bahan kajian. Melihat Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pengembangan Islam di Indonesia. Kemunculan Madrasah di Jawa Barat diawali dengan pendirian Madrasah Mualimin yang didirikan oleh Persatuan Umat Islam (yang saat itu masih bernama Perhimpunan Hayatul Qulub) pada tahun 1923. Perhimpunan Hayatul Qulub ini mendirikan dan mengelola Lembaga Pendidikan yang memang mengadopsi sistem Pendidikan pesantren dan sekolah. Dalam pelaksanaannya para santri selain belajar di surau pada sore sampai malam hari, santri juga didorong untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas pada pagi sampai siang hari. Jika pagi sampai- siang hari para santri mempelajari pengetahuan umum dan bahasa asing seperti Bahasa Belanda dan Inggris, maka pada sore hingga malam hari mereka dituntut untuk mempelajari ilmu agama.

Pada saat itu, sistem Pendidikan madrasah semacam itu memang tidak lazim dilakukan oleh sekolah Belanda maupun pada pembelajaran di Pesantren. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat cabang-cabang Ianatul Mutaa’limin (nama Hayatul Qulub/ PUI saat ini) menjadi organisasi yang masyhur dan terkenal sebagai satu-satunya pusat Pendidikan Islam modern di Majalengka. Ianatul Muta’alimin ini kemudian bahkan mengepakkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang Madrasah diberbagai daerah seperti, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Jatibarang, bandung, Cianjur bahkan sampai ke Tegal (Jawa Tengah).

Menurut Data Emis Pendis Kementerian Agama RI pada tahun 2020 saat ini jumlah MA yang tersebar di Jawa Barat sebanyak 1.187 berstatus swasta dan 77 berstatus negeri dengan jumlah siswa 96.841 laki-laki dan 127.116 perempuan. Jumlah ini menduduki posisi ke-2 MA terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. Dilihat dari persebaran MA baik negeri maupun swasta, masing-masing sudah tersebar di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah yang sama bahkan lebih banyak dari jumlah kecamatan yang ada. Maka data ini menunjukkan bahwa MA semakin diakui perannya dan dipercaya oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa khususnya di Jawa Barat (Kurniawan, 2019).

MA khususnya di Jawa Barat telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa khususnya dalam konteks akses dan pemerataan Pendidikan. Biaya Pendidikan di MA yang relative lebih murah dan banyaknya sebaran MA di setiap kecamatan yang berarti menunjukkan mudahnya akses menempuh jarak MA menjadi alasan madrasah Aliyah menjadi Lembaga Pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, dengan terus berkembangnya MA di Jawa Barat maka peran MA pun juga dilihat dari segi bagaimana ia menjadi jawaban atas krisis moral yang dihadapi diera seperti sekarang ini. MA dapat menyelenggarakan pendidikan yang mendorong pada pembentukan karakter, mendidik manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya (Huda, 2016).

Dalam konteks kekinian image MA dan Lembaga pendidikan keagamaan lainnya telah berubah, karena kini MA tidak hanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah tetapi juga kalangan menengah ke atas. Apalagi kini pembelajaran di beberapa MA di Jawa barat didukung dengan pengembangan Bahasa Asing (English/Arabic Daily) dan digitalisasi pembelajaran yang menjadi syarat berkembangnya ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa MA di Jawa Barat diantaranya MA Husnul Khotimah Kuningan, MAN 2 Kota Bandung, MAN 1 Ciamis.

Jika pada awal berdirinya perkembangan madrasah terhambat dan memiliki banyak tantangan berupa kebijakan-kebijakan pemerintahan, maka dalam perkembangan selanjutnya peran madrasah didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Berbagai bentuk upaya dukungan pemerintah tentu juga menuntut MA di Jawa Barat untuk terus melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang berarti bahwa madrasah harus mejadikan dirinya sebagai Lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan bagi umat islam khususnya. Di era ini kebutuhan utama umat Islam dan masyarakat secara umum memang hal-hal yang identic dengan keagamaan dan moral. Namun demikian, bukan berarti MA hanya berorientasi pada aspek ukhrawi, tapi juga harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat global (Eriyanto, 2019).

Menindaklanjuti perkembangan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks, MA harus tetap survive dan beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan peradaban baru yang semakin dahsyat di abad 21. Memasuki abad 21 terjadi digitalisasi sebagai dampak dari evolusi teknologi (terutama informasi dan komunikasi). Abad ini menuntut madrasah agar membekali siswanya dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Selain itu, siswa juga perlu menguasai pengetahuan konten dan sikap ilmiah, memiliki literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Karena abad ini mengharuskan manusia-manusianya agar cakap teknologi dan cakap dalam menyikapi ledakan-ledakan informasi. Sehingga madrasah-madrasah termasuk di Jawa Barat perlu untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, baik dalam konteks menejmen pendidikan maupun dalam proses pembelajarannya (Kurniawan, 2019).

Reformasi konteks menejemen pendidikan dan proses pembelajaran dalam rangka membekali siswa dengan keterampilan abad 21 tentu harus didukung dengan kurikulum, SDM dan sarana yang memadai. Selain itu, guru madrasah abad 21 sudah seharusnya menyadari bahwa posisinya saat ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran, yang berperan sebagai penasihat, pembimbing atau pemandu daripada rujukan otoriter yang tak bisa dibantah di kelas. Selain itu, guru harus pula memfasilitasi siwa dengan pembelajaran berbasis teknologi didukung dengan kemampuan literasi informasi dan literasi lainnya untuk mendorong terjadinya pembelajaran yang mengarahkan siswa pada keterampilan abad 21 (Trihoran, 2019). Hal yang kemudian menjadi pendukung lain adalah sarana dan prasarana madrasah. Dalam pembelajaran abad 21, teknologi dan informasi serta daya dukung seperti alat komunikasi dan jaringan menjadi bagian yang sangat penting.

1. **Kebijakan Madrasah Menghadapi Era Informasi**

Kebijakan madrasah dapat dikenali melalui rumusan visi, misi, serta program-programnya. Bukan hanya yang tertulis, tetapi lebih dari itu adalah yang dilaksanakan. Visi madrasah memberikan gambaran yang jelas tentang nilai dan tujuan madrasah. Dengan menguraikan apa yang ingin dicapai madrasah, masyarakat madrasah (guru, siswa, keluarga, dan administrator) dapat bekerja sama dalam arah yang sama menuju pertumbuhan. Dengan menguraikan secara luas tujuan dan nilai-nilai madrasah, akan memotivasi dan menyatukan semua orang untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya siswa. Uraian berikut mendeskripsikan hasil wawancara bersama kepala madrasah.

Kegiatan dan media pembelajaran literasi informasi tidak banyak ditemukan di madrasah. Dari 14 Kepala Madrasah yang diwawancarai, ada dua madrasah yang paling banyak menggambarkan adanya kegiatan dan media yang dapat mendorong pembelajaran literasi informasi, yaitu MAN 1 Cianjur dan MAS Husnul Khotimah. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut.

“Kegiatan literasi seminggu sekali, 3 pojok baca di sudut sekolah, Perpustakaan Mini di tiap kelas, kegiatan literasi digital bekerjasama dengan Kominfo. Kelas X 3 guru profesional di bidang IT, Kelas XI pengembangan literasi digital dan Kelas XII pengembangan kecakapan digital” ̶ MAN 1 Cianjur

“Menyiapkan sarana prasarana (6 lab komputer dengan internet 600 MB, 2 Perpustakaan dengan jumlah buku 5000 eksemplar, 2 media koran, Akses Wifi tiap kelas, Proyektor dan LCD), mengembangkan Mading oleh OSIS dengan fokus pada tema Olahraga, Politik dan Keagamaan, Adanya Komunitas Lingkar Pena, Jurnalistik, Kelompok Ilmiah Remaja, Klub Pencinta Buku, Menerbitkan Majalah Pondok, Gen-Q (Putri) dan Aqias (Putra), Perpustakaan Digital dan Pembelajaran E-Learning” ̶ MAS Husnul Khotimah

Banyak tantangan (sekaligus peluang) dalam menyiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan di era informasi. Apa sajakah modal yang telah dimiliki madrasah dalam menghadapi tantangan tersebut? Hasil wawanca menemukan dua madrasah (dari 14 madrasah yang diteliti) yang jawabannya paling menggambarkan adanya kepemilikan modal yang mendukung pempelajaran literasi informasi, yaitu MAS Husnul Khotimah dan MAN 2 Cirebon.

Ketika ditanyakan tentang kiat dan strategi madrasah dalam menghadapi tantangan era informasi, jawaban yang menarik perhatian diberikan oleh MAN 2 Kota Bandung, MAN 2 Kota Bogor, MAN 1 Kota Tasikmalaya, dan MAN 1 Kuningan. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut: “*cakap digital, pendidikan karakte*r” (MAN 2 Kota Bandung), “*membangun komitmen*” (MAN 2 Kota Bogor), “*penekanan pada aspek menejerial, supervisi, evaluasi, tindak lanjut* ” (MAN 1 Kota Tasikmalaya), “*workshop untuk guru terkait pembelajaran-pembelajaran dengan media-media yang menyenangkan*” (MAN 1 Kuningan).

Ketika ditanyakan “Apakah kiat dan strategi madrasah dalam menghadapi tantangan era informasi tersebut termuat dalam visi madrasah?” sebagian besar madrasah menunjukkan adanya rumusan visi yang secara tersirat menuju pada terwujudnya pembelajaran yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya visi MAN 2 Kota Cirebon, “*Cerdas, Religius, Mandiri, Kompetitif (4.0)*”. Beberapa madrasah telah memiliki program khusus yang mendukung penyiapan generasi yang cakap di era teknologi informasi. Misalnya adalah sebagai berikut: “*upgrading IT webinar cakap digital, ekskul IT, kompetisi science*” (MAN 2 Kota Bandung), “*kajian-kajian riset*” (MAN 1 Kota Tasikmalaya), “*kolom guru menulis, kompetisi menulis, peningkatan SDM di bidang ekstrakurikuler*” (MAS Husnul Khotimah), “*ISC (Inclusive Science Club)*” (MAN 1 Ciamis), “*program jurnalistik*” (MAN 2 Kota Cirebon).

1. **Kesiapan Guru Madrasah dalam Pembelajaran Literasi Informasi**

Penelitian tentang kesiapan guru madrasah dalam pembelajaran literasi informasi diawali dengan identifiksi konsepsi guru terhadap literasi informasi itu sendiri. Hasil identifikasi menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki konsepsi literasi informasi sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan pengakuan 28 guru saat diajukan 7 pertanyaan seputar aktivitas yang berkaitan dengan literasi informasi, sebagian besar guru menunjukkan memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat menunjang pengembangan kompetensi pengajar literasi informasi. Pada skala 1 sampai 10, sebagian besar guru mengaku pada posisi antara 8 dan 9.

1. **Proses Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah**

Dari 14 madrasah yang diteliti, disimpulkan bahwa seluruhnya memasukkan konten online ke dalam pembelajaran, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Namun, tidak ditemukan madrasah yang secara sistematis memasukkan pembelajaran literasi informasi sebagai bagian dari kurikulum. Tidak ada pemantauan sistematis penggunaan teknologi dan tidak ada diskusi tentang implikasi pedagogisnya untuk pengembangan pembelajaran. Juga tidak ada penilaian yang dibuat untuk belajar tentang pengetahuan yang diperoleh siswa sebagai hasil dari penggunaan teknologi.

Temuan lebih lanjut adalah bahwa sebagian besar guru yang diwawancarai kurang tepat dalam memaknai literasi informasi dan tidak cukup membedakan antara penggunaan alat teknologi dan perubahan substantif yang diperlukan dalam metode pembelajaran. Mereka menggunakan teknologi terutama menemukan bahan ajar dan untuk pemutaran presentasi pembelajaran. Tampaknya mereka kurang menyadari pentingnya menanamkan keterampilan tersebut kepada siswa mereka.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Lesson Plan atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru, studi ini tidak menemukan adanya madrasah yang menerapkan pembelajaran literasi dengan pendekatan terpadu atau terintegrasi pada semua mata pelajaran. Sebagian besar orang yang diwawancarai berpandangan bahwa pembelajaran literasi informasi berkaitan langsung dengan mata pelajaran TIK, bahkan cenderung menyamakannya. TIK dianggap sebagai pelajaran khusus yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis mengakses, mengelola, dan menyajikan informasi.

1. **Pembahasan**

Konsepsi guru madrasah terhadap literasi informasi (hasil studi ini) hampir sama dengan yang dihasilkan dari studi lain seperti Boon, Johnston dan Webber (2007), yang cenderung berkisar pada bidang pencarian informasi, keterampilan TIK, dan kegiatan penelitian. Berdasarkan pola antara konsepsi literasi informasi guru dan pendekatan instruksional yang digunakan oleh guru, dapat disimpulkan bahwa konsepsi literasi informasi guru mempengaruhi apa yang mereka fokuskan untuk mengajar dan bagaimana pendekatan mereka dalam pembelajaran. Pemahaman guru tentang literasi informasi memiliki implikasi yang kuat pada bagaimana mereka mengajar dan mengintegrasikan keterampilan melalui tugas berbasis sumber daya.

Studi ini juga menemukan adanya keterkaitan antara pemahaman atau konsepsi guru tentang literasi informasi dengan pengajaran yang dipraktikkan. Guru mengoperasional-kan pemahamannya melalui beberapa pendekatan pengajaran yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan pengajaran. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan pelatihan literasi informasi yang memadai kepada para guru agar mereka dapat membantu mengembangkan keterampilan literasi informasi peserta didiknya.

Studi ini tidak menemukan adanya madrasah yang menerapkan pembelajaran literasi dengan pendekatan terpadu atau terintegrasi pada semua mata pelajaran. Pendekatan ini oleh Amram et al. (2020) disebut sebagai pendekatan langsung yang banyak diterapkan di banyak negara. Dengan pendekatan seperti itu, pembelajaran literasi informasi hanya menjadi tugas guru TIK. Tidak cukup. Apalagi kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pembelajran TIK di madrasah hanya diarahkan terutama pada pengolah kata, presentasi PowerPoint, dan pencarian informasi. Tidak banyak memberi ruang untuk belajar bagaimana berpikir kritis untuk menganalis dan mengevaluasi suatu informasi yang diperlukan dalam kehidupan. Masih jauh dari usulan Willison & O’Regan (2005) tentang pembelajaran literasi informasi yang lebih holistik dengan memahaminya dalam hal pembelajaran sepanjang hayat. Banyak guru (matapelajaran apapun) tidak menyadari pentingnya pembelajaran literasi informasi atau tidak tahu bagaimana melakukannya.

Diperlukan pelatihan yang sistematis dan konsisten, dimulai dengan program pelatihan guru bersama instruktur terlatih. Menurut Berliner (1994) terdapat lima tahapan yang dialami guru untuk dapat dikatakan menjadi guru ahli, yaitu: (1) pemula, dengan pengalaman mengajar satu tahun pertama, (2) pemula lanjut, dengan pengalaman mengajar 2-3 tahun, (3) kompeten, dengan pengalaman mengajar 3-4 tahun, (4) cakap/pandai, dengan pengalaman mengajar 5 tahun, dan (5) ahli, dengan pengalaman mengajar 5 tahun ke atas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin lama seorang guru menekuni tugas mengajar, semakin tinggi penguasaan dalam melakukan tugas mengajar. Jika mengacu pada teori tersebut, maka seharusnya sebagian besar guru menunjukkan keahliannya, karena masa kerjanya lebih dari 5 tahun. Kesimpulan sementara yang bisa ditarik adalah bahwa masa kerja tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman belajar. Tidak semua guru menunjukkan komitmen belajar yang baik.

**CONCLUSION (Times New Roman font 12, Bold)**

Hasil evaluasi menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut. Pertama, madrasah perlu merumuskan kebijakan pembelajaran yang adaptif sesuai dengan jaman yang akan dihadapi oleh peserta didik; Rumusan kebijakan tersebut harus diterjemahkan oleh setiap guru dalam pembelajaran di kelas, apapun bidang studinya. Kedua, peningkatan kualitas guru harus menjadi program berkelanjutan, tidak pernah berhenti, untuk semua guru; Guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menjadi subject matter, metodologi pembelajaran, dan juga teknologi pembelajaran. Ketiga, diperlukan peninjauan kurikulum madrasah secara berkala yang mengarah pada perubahan tuntutan masyarakat global dengan mempertahankan kearifan lokal. Keempat, dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang optimal tidak dapat diabaikan dalam mendukung kegiatan madrasah yang lebih kompetitif, seperti dukungan laboratorium, multi media, dan sarana praktikum. Kelima, seleksi masuk program pendidikan keguruan, juga seleksi atau perekrutan calon guru, perlu mempertimbangkan inti-kepribadian (termasuk di dalamnya adalah komitmen keguruan).

**ACKNOWLEDGEMENT (If any) (Times New Roman font 12, Bold)**

Ucapan terimakasih kepada editor dan reviewer atas kontrobusinya dalam proses penerbitan artikel ini. Juga terimakasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberi kesempatan sekaligus membiayai penelitian ini.

**REFERENCES (Times New Roman font 12, Bold)**

ACRL. 2000). *Information literacy competency standards for higher education.*

American Association of School Librarians (AASL) and Association for Educational Communications and Technology (AECT). (1998). *Information Power: Building Partnerships for Learning*. Chicago, American Library Association.

American Library Association. (1989). *Presidential Committee on Information Literacy*. Final Report. Chicago: American Library Association.

American Library Association. (2000). Information literacy competency standards for higher education.

As’ad, Mahrus. (2014). Pembaruan Pendidikna islam nahdlatul Ulama. *Nizham,* 3 (2), 71.

Bashori. (2017). Modernisasi Lmebaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa,* 11 (2)*,* 288.

Bawi, Z. A. (2002). Implementing technology in schools: perception of principals towards the implementation of Malaysian Smart School. Ubpublished Master thesis.International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Breivik, P. S., & Senn, J. A. (1994). *Information Literacy: Educating Children for the 21st Century*. Scholastic Inc., 411 Lafayette, New York, NY 10003.

Deliasari, A., & Kurnianingsih, I. (2017). Analisis Kebutuhan Topik Pembelajaran Literasi Informasi Online Pada Perpustakaan Sekolah MAN Insan Cendekia. *Edulib*, *7*(2).

Eriyanto. (2019). Pengelolaan Madrasah yang Efektif: Menjawab tantagan Pendidikan islam Era 4.0, 4 (1), 74.

Garner, S. D. 2006. *High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, November 6-9, 2005: Report of a meeting sponsored by the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), National Forum on Information Literacy (NFIL) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).*

Hart, G. (2000). Project work as a vehicle for information literacy education in a circuit of South African primary schools. Proceedings of the 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel 13-18 August 2000. Available at: <http://ifla.queenslibrary.org/IV/ifla66/papers/074-133e.htm>.

Hawi, Akmal. (2017). Otonomi Pendidikan dan Eksistensi Madrasah. *Conciencia,* 17 (1), 2.

Huda, Khoirul. (2016). Problematika Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Dinamika Penelitian,* 16 (2), 319.

Jamaluddin, N. (2018). *Implementasi Program Gerakan Literasi Madrasah: Penelitian Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Juliane, C., Arman, A. A., Sastramihardja, H. S., & Supriana, I. (2017). Digital Teaching Learning for Digital Native; Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, *3*(2), 29-35.

Julien, H. and S. Barker. (2009). How high-school students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development. Library & Information Science Research, Vol. 31: 12-17.

Kosim, Mohammad. (2007). Madrasah di Indonesi (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris,* 2 (1), 57.

Kurnianingsih, I., Rosini, R., & Erza, E. K. (2018). Library Class: Model Pembelajaran Literasi Informasi Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus SD Madania). *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, *27*(2), 51-58.

Kurniawan, S. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. *Intizar*, *25*(1), 55-68.

Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning.

Lloyd, A. (2005). Information literacy: different contexts, different concepts, different truths? *Journal of Librarianship and information Science*, *37*(2), 82-88.

Mahdalena. (2017). Sejarah Pendidikan Islam Madrasah (Sekolah Umum yang Berciri Khas Islam). *An-Nizom*, 2 (1), 120.

Moore, P. (2002). *An analysis of information literacy education worldwide*. White Paper prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy. Information Literacy Meeting of Experts, Praque, The Czech Republic.

Pattah, S. H. (2014). Literasi informasi: peningkatan kompetensi informasi dalam proses pembelajaran. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, *2*(2), 108-119.

Prensky, M., (2001). Digital natives, digital immigrant. *On the Horizon*, 9 (5)

Purwanti, K. Y., Putra, L. V., & Hawa, A. M. (2018). Literasi informasi untuk meningkatkan keterampilan pencarian informasi ilmiah siswa SMA. *International Journal of Community Service Learning*, *2*(4), 237-241.

Rosidin, DN. (2007). From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathlaul Anwar.

Sahputra, D. (2018). Dinamika Madrasah sebelum Indonesia Merdeka. *ITTIHAD,* 2 (2), 155-158.

Sardar, Z. (1988). Tantangan Dunia Islam Abad 21, Mizan, Bandung

Septiantono, T. (2017). Konsep Dasar Literasi Informasi. *Jakarta: Universitas Terbuka.[Online] Diakses dari: http://repository. ut. ac. id/4198/1/PUST4314-M1. pdf pada*, 25-10.

Sriwijaya, S. T. A. B. N. *Etika Komputer dan Kompetensi Content Evaluation sebagai Strategi Menangkal Radikalisme Guna Meningkatkan Nasionalisme di Era Digital*.

*Trihoran, Emmeria.* (2019). Guru Dalam pengajaran abad 21. *Sapa,* 4 (1), 54.

Wallace, M. C., Shorten, A., & Crookes, P. A. (2000). Teaching information literacy skills: an evaluation. *Nurse education today*, *20*(6), 485-489.

Weiner, J. 2011. Is there a difference between critical thinking and information literacy? A systematic review 2000-2009. *Journal of Information Literacy* 5(2): 81-92.

Weiner, S. 2011. How information literacy becomes policy: An analysis using the Multiple Streams Framework. *Library Trends* 60(2): 297-311.

Williams, D. & Wavell, C. (2006). *Information literacy in the classroom: Secondary school teacher's conceptions*. Final report on research funded by Society for Educational Studies. Research Report 15.The Robert Gordon University.

Yusup, P. M., & Saepudin, E. (2017). Praktik literasi informasi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat (information literacy practices in the process of lifelong learning). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, *5*(1), 79-94.

**Additional:**

The length of the manuscript from the title to the list of references is no more than 15 (fifteen) pages.